



PEMBAHASAN DI DPRD MACET

Walikota Teken Perwal Pengganti APBD-P 2014

YOGYA (MERAPI)- Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti akhirnya akan mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) tentang pemanfaatan anggaran sebagai pengganti Perda APBD Perubahan 2014. Pasalnya pembahasan anggaran perubahan sudah tidak memungkinkan dilakukan dengan sisa waktu yang ada.

"Ini saatnya plan B dengan Perwal. Sudah tidak memungkinkan lagi dibahas anggaran perubahan. Secepatnya agar tidak mengganggu pelaksanaan anggaran untuk kepentingan masyarakat," terang Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Balaikota, Senin (27/10).

Dijelaskan pengeluaran perwal sesuai tata kala anggaran yang harus dilaksanakan. Hal ini agar kegiatan dan program pemkot tetap dapat berjalan. Sebelumnya Pemkot telah menyusun tata kala pembahasan APBD Perubahan 2014 yang ditargetkan ditetapkan pada 13 November, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan pembahasan di dewan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, jika Perda APBD belum dapat disahkan, kepala daerah dapat mengeluarkan peraturan untuk menjalankan anggaran pemerintah. Pada awal tahun Pemkot Yogyakarta juga menerbitkan Perwal pemanfaatan anggaran karena APBD murni 2014 baru disahkan Maret.

Pihaknya kemarin juga telah mengumpulkan semua kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait evaluasi serapan anggaran dan kebutuhan untuk menyusun Perwal. "Perwal

akan kami konsultasikan dengan provinsi. Paling tidak akhir Oktober ini sudah terbit perwalnya," tambah Haryadi.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono menambahkan materi yang akan dikonsultasikan ke Pemda DIY terkait kegiatan-kegiatan yang dapat diakomodasi dalam perwal pemanfaatan anggaran.

"Kegiatan yang dimasukkan yang benar-benar dibutuhkan. Sifatnya wajib mendesak dan mengikat kebutuhan," ujar Kadri.

Pemkot rencananya mengusulkan 3 kegiatan yang mendesak yakni honorarium untuk tenaga bantuan, guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang nilainya mencapai Rp 9 miliar. Selain itu untuk pembiayaan listrik di 2 instansi pemkot dan pembayaran tunggakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 2014.

Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta M. Ali Fahmi menilai Walikota perlu segera menerbitkan Perwal pengganti Perda APBD Perubahan 2014. Pihaknya juga mengakui dinamika dewan menyebabkan pembahasan APBD Perubahan terhambat.

"Perwal pengganti Perda APBD Perubahan sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nasib honor naban dan guru non CPNS serta tenaga outsourcing (alih daya)," urainya.

Pihaknya juga mendorong segera diadakan mekanisme formal untuk pembentukan pimpinan alat kelengkapan dewan. Ini agar dewan segera berfungsi optimal.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005